PEMERINTAH KOTA BIMA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2023

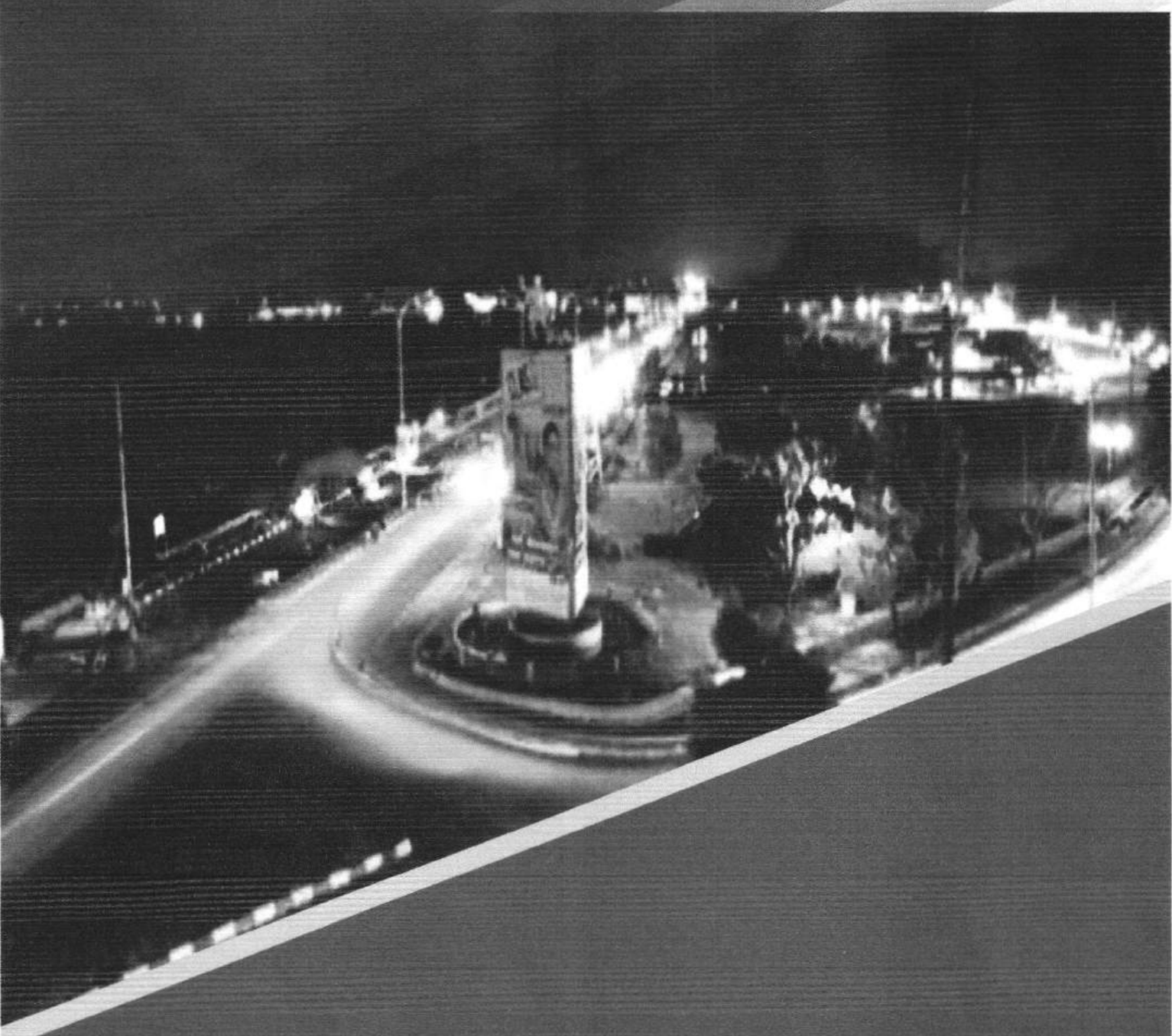

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga Rencana Strategis (*Renstra*) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Startegis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (*RPD*) Kota Bima Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra SKPD dilakukan bersamaan dengan RPD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi misi Sekretariat Daerah, yaitu " ***Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima menuju good governance dan Terwujudnya efisiensi, efektifitas, konsisten, kecepatan, ketepatan, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Umum untuk terciptanya manajamen birokrasi yang jujur dan profesional*** " maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Bima pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima di masa akan datang pada khusunya.

Kota Bima, 18 April 2023

Sekertaris Daerah Kota Bima

Drs. MUKHTAR, M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690531 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.3.1. Maksud 4
1.3.2. Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6
2.1.1. Susunan Organisasi 6
2.1.2. Tugas dan Fungsi 7
2.2 Sumber Daya Perangkat daerah 17
2.2.1. Sumber Daya Manusia 17
2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal 18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah 19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah 26
2.4.1. Tantangan 26
2.4.2. Peluang 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ... 27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 27
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah 28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59
BAB VIII PENUTUP 62

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	17
Tabel	2.2.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan	18
Tabel	2.3.	Jumlah pegawai berdasarkan eselonering	18
Tabel	2.4.	Pencapaian Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel	2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023	21
Tabel	3.1	Permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah	27
Tabel	4.1.	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima	31
Tabel	4.2.	Formula Perhitungan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima	32
Tabel	4.3.	Casecading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima	33
Tabel	5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	49
Tabel	6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Bima	52
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bima Tahun 2024-2026	60
Tabel	7.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah yang Tahun 2024-2026	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerzner menyebutkan bahwa Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Pendapat lain diuraikan oleh Robert N. Anthony yaitu bahwa perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DAERAH

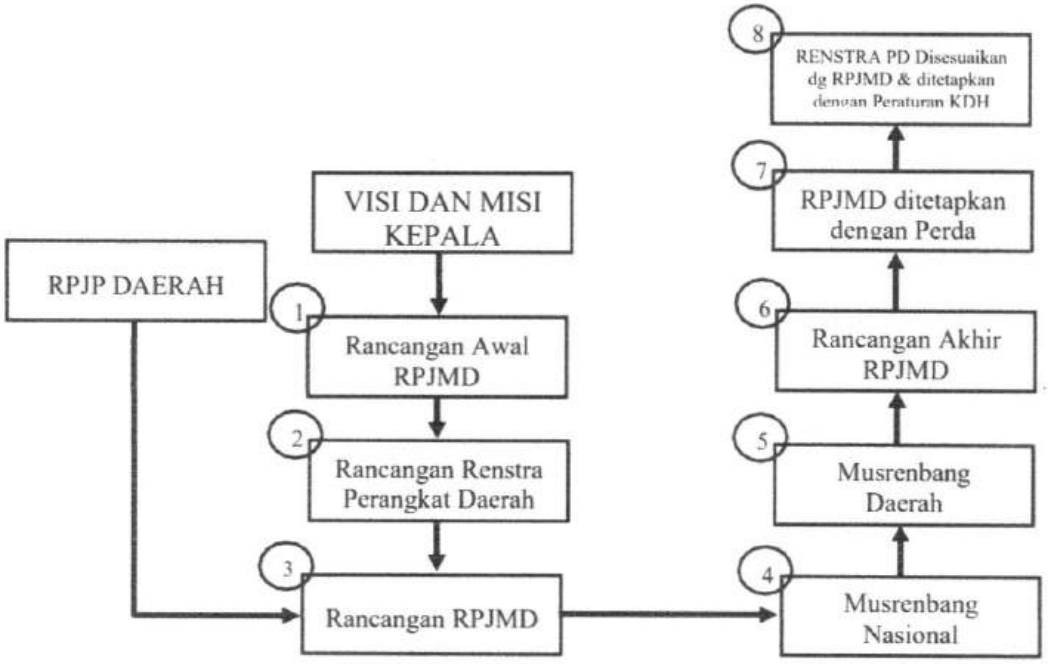

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota dengan masa jabatan berakhir tahun 2022 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2023 - 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023 - 2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada Tahun 2023 – 2026 dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan. Renstra Tahun 2023 – 2026 ini disebut Renstra Antara. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

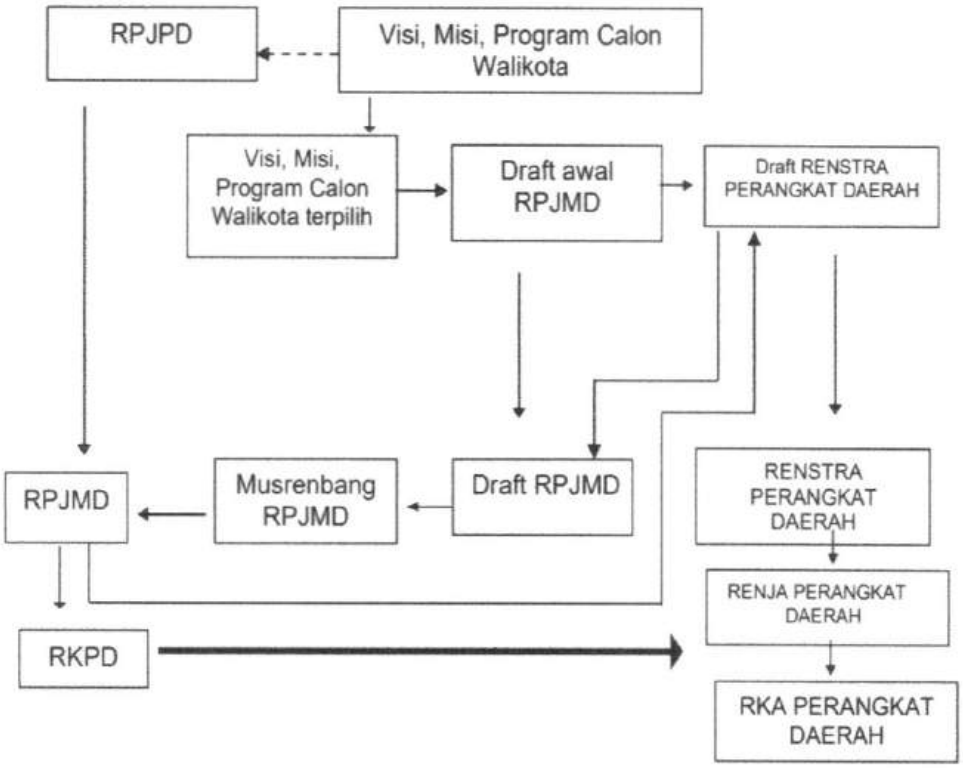

RPD Kabupaten /Kota 2023 2026 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020 2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kab /Kota s.d. tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kab /Kota 2017 2022;
4. RPJMD/RPD Provinsi 2023 2026;

5. Isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku

1.2. Landasan Hukum

Renstra Sekretariat Daerah Kota Bima didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 ;
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 ;
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima serta Staf Ahli.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kota Bima Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Kota Bima.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kota Bima tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Sekretariat Kota Bima Kota, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Sekretariat Kota Bima.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Kota Bima dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Kota Bima yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat Kota Bima Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Capaian Program dalam pelaksanaan renstra periode sebelumnya
- 2.4. Hambatan tantangan dan peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Sekretariat Daerah Kota Bima
- 4.2 Casecading Kinerja PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Perangkat Daerah dalam Masa Pelaksanaan Renstra

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Bima merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Bima diatur dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu walikota Bima dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Walikota Bima dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
   1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   3) Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
   1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Asisten Administrasi Umum
   1) Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   2) Bagian Umum
      a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
      b. Kelompok Jabatan Fungsional.
   3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
      a. Sub Bagian Protokol
      b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

A. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Pemerintah Daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di pimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum serta pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum
b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, pemuda dan olahraga, komunikasi dan informatika, persandian, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pariwisata, kesatuan bangsa dan politik serta perpustakaan dan kearsipan.

1. Bagian Pemerintahan

   Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

   Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.
   c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.
   d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan informasi.

3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa.
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa.
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, perhubungan, statistik, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup.

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

   Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2. Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

D. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum di pimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretariat Daerah;

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan.
2. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi.
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi.

4. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi.
6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan urusan pelayanan administratif seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, keuangan, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan aparatur sipil negara.

1. Bagian Organisasi

   Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian organisasi mempunyai fungsi:

   1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
   2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
   3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerjadan Reformasi Birokrasi;
   4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
   5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

2. Bagian Umum

   Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
4. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam penyelenggarakan tugasnya, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdidi dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorangan tenaga fungsional yang ditunjuk.
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perunfang-undangan.
5. Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Grafik 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima

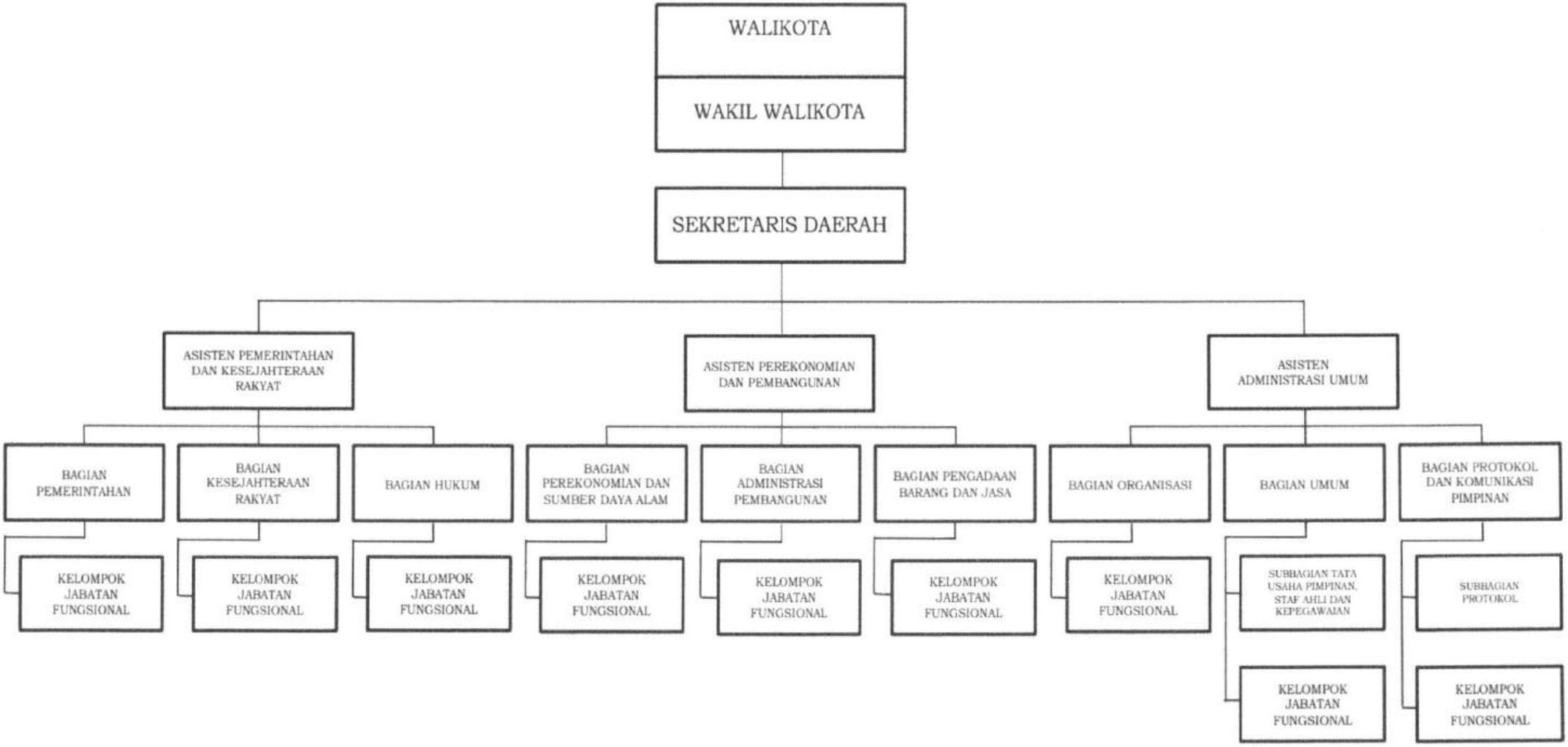

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2022 sebanyak 129 orang.

Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kota Bima didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 129 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

A. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :
   1. Strata 3 (S3) : 0 orang
   2. Strata 2 (S2) : 9 orang
   3. Strata 1 (S1) : 102 orang
   4. Diploma : 2 orang
   5. SMA/ Sederajat : 14 orang
   6. SMP/ Sederajat : 1 orang
   7. SD/ Sederajat : 1 orang

B. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :
   1. Golongan IV : 4 orang
   2. Golongan III : 105 orang
   3. Golongan II : 9 orang
   4. Golongan I : 1 orang

C. Berdasarkan eselonering, terdiri dari :
   1. Eselon II : 7 orang
   2. Eselon III : 9 orang
   3. Eselon IV : 2 orang
   4. Fungsional : 23 Orang
   5. Non Eselonering : 88 orang

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2022, keadaan pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.1.
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S3	0	-
2.	S2	9	6,98
3.	S1	102	79,07
4.	Diploma	2	1,55
5.	SMA / Sederajat	14	10,85
5.	SMP / Sederajat	1	0,78
5.	SD / Sederajat	1	0,78
Total		129	100,00

Sumber : Bagian Umum Setda Kota Bima, 2022

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tabel 2.2.
Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	14	10,85
2.	Golongan III	105	81,40
3.	Golongan II	9	6,98
4.	Golongan I	1	0,78
Total		129	100,00

Sumber : Bagian Umum Setda Kota Bima, 2022

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

Tabel 2.3.
Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	7	5,43
2.	Eselon III	9	6,98
3.	Eselon IV	2	1,55
4.	Fungsional	23	17,83
5.	Non-Eselonering	88	68,22
Total		129	100,00

Sumber : Bagian Umum Setda Kota Bima, 2022

2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal

Kantor Sekretariat Daerah Kota Bima terletak di Jalan Soekarno-Hatta Raba, Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Sekretariat Daerah pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, *air conditioner* (AC), *dispenser*, kipas angin, dan televisi;
f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2023 – 2026. Renstra Sekretariat Daerah mengalami perubahan sebagai tindak lanjut perubahan RPD Kota Bima Tahun 2024 – 2026 dan perubahan indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 -2026. Kinerja pelayanan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targer NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah			Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja			Nilai SAKIP	65,01	65,68	70,01	72	80,01		67,05	68,48	68,69	68,17		102,09	97,81	95,40	85,20
3	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah			Nilai LPPD	3,000	3,193	3,2	3,210	3,220	3,0266	3,2595			2,650	100,89	102,08			82,29
4	Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM			Skor rata-rata IKM		78,58	80,00	85,00	88,35		82,36	82,61	83,42	86,89		104,81	103,26	98,14	98,35
5	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan			Porsentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah			Persentase OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan			porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah			Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Meningkatnya pengamalan ajaran agama			Indeks kerukunan umat beragama	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Presentase Realisasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	68.320.397.234	64.457.792.849	62.155.203.894	67.066.968.352	52.266.126.150		98,17	81,09	
Sekreatriat Daerah	68.320.397.234	64.457.792.849	62.155.203.894	67.066.968.352	52.266.126.150		98,17	81,09	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.411.269.466	30.945.980.553	27.613.213.304	28.395.680.905	29.796.277.700		96,55	96,28	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.822.000	12.464.000	12.504.000	12.822.000	12.464.000		100,00	100,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.986.000	1.648.000	1.648.000	1.986.000	1.648.000		100,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.709.000	2.704.000	2.714.000	2.709.000	2.704.000		100,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.709.000	2.704.000	2.714.000	2.709.000	2.704.000		100,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.709.000	2.704.000	2.714.000	2.709.000	2.704.000		100,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.709.000	2.704.000	2.714.000	2.709.000	2.704.000		100,00	100,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.522.133.376	13.475.361.058	13.878.105.103	13.248.570.220	13.196.883.519		97,98	97,93	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.885.723.876	12.820.217.558	13.241.212.603	12.612.165.320	12.546.240.019		97,88	97,86	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	632.259.500	650.860.500	632.259.500	632.254.900	646.360.500		100,00	99,31	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.382.000	1.493.000	1.843.000	1.382.000	1.493.000		100,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.768.000	2.790.000	2.790.000	2.768.000	2.790.000		100,00	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.224.600	19.369.500	13.234.200	13.168.600	19.341.500		99,58	99,86	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.224.600	19.369.500	13.234.200	13.168.600	19.341.500		99,58	99,86	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.510.962.025	1.664.027.150	1.656.924.536	1.510.898.970	1.627.656.740		100,00	97,81	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.889.100	83.889.700	63.889.100	63.888.950	83.889.600		100,00	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.027.975	114.622.500	94.711.975	94.026.350	114.622.500		100,00	100,00	

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Presentase Realisasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.053.900	71.903.900	59.053.900	59.019.750	71.850.500		99,94	99,93	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.151.941.050	1.245.441.050	1.136.441.050	1.151.913.920	1.209.124.140		100,00	97,08	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.050.000	148.170.000	302.828.511	142.050.000	148.170.000		100,00	100,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.691.476.400	1.724.110.734	1.004.540.000	1.538.870.000	1.709.967.095		90,98	99,18	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.506.810.000	1.491.180.734	705.730.000	1.506.130.000	1.477.482.795		99,95	99,08	
Pengadaan Mebel	184.666.400	232.930.000	298.810.000	32.740.000	232.484.300		17,73	99,81	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.343.369.680	3.609.423.126	3.293.109.480	3.142.591.664	3.402.781.271		93,99	94,27	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	267.165.000	288.365.000	290.427.000	266.860.000	287.615.000		99,89	99,74	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.308.634.800	1.454.042.280	1.355.455.800	1.196.007.164	1.273.909.841		91,39	87,61	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.767.569.880	1.867.015.846	1.647.226.680	1.679.724.500	1.841.256.430		95,03	98,62	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.081.337.400	2.096.178.000	1.667.830.000	2.061.790.830	2.095.921.775		99,06	99,99	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.860.000	450.630.000	450.630.000	444.079.790	450.570.153		99,82	99,99	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	767.976.400	687.530.000	653.470.000	749.340.320	687.526.820		97,57	100,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.670.000	262.670.000	201.210.000	262.663.000	262.562.500		100,00	99,96	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536.771.000	626.288.000	339.500.000	536.650.220	626.209.302		99,98	99,99	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.060.000	69.060.000	23.020.000	69.057.500	69.053.000		100,00	99,99	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.182.398.035	1.182.399.585	1.222.899.585	832.752.745	833.823.281		70,43	70,52	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	521.398.035	521.399.585	521.399.585	253.725.645	274.375.788		48,66	52,62	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.000.000	81.000.000	121.500.000	81.000.000	53.000.000		100,00	65,43	

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Presentase Realisasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000	180.000.000	180.000.000	98.027.500	121.447.893		54,46	67,47	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000	399.999.600	384.999.600		100,00	96,25	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.965.714.900	1.995.114.900	1.784.914.900	1.963.465.656	1.826.603.382		99,89	91,55	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.025.808.000	1.032.808.000	1.029.608.000	1.024.531.956	997.178.992		99,88	96,55	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	777.404.000	799.804.000	592.804.000	776.631.700	667.134.180		99,90	83,41	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	162.502.900	162.502.900	162.502.900	162.302.000	162.290.210		99,88	99,87	
Penataan Organisasi	450.220.500	465.769.500	510.378.500	437.077.270	453.543.031		97,08	97,37	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	147.785.970	231.905.000	258.526.500	141.009.970	231.667.900		95,41	99,90	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	113.832.530	54.685.500	54.706.000	112.658.500	48.618.300		98,97	88,91	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	70.280.000	39.121.000	40.031.000	68.239.000	36.106.000		97,10	92,29	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	57.013.000	39.092.000	39.026.500	56.070.000	38.683.501		98,35	98,96	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	61.309.000	100.966.000	118.088.500	59.099.800	98.467.330		96,40	97,53	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.637.610.550	4.701.763.000	2.568.773.000	3.633.672.950	4.617.292.106		99,89	98,20	
Fasilitasi Keprotokolan	1.772.015.200	3.256.874.000	1.686.060.000	1.771.737.500	3.256.124.000		99,98	99,98	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.179.969.800	983.345.000	541.582.500	1.178.932.150	981.644.106		99,91	99,83	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	685.625.550	461.544.000	341.130.500	683.003.300	379.524.000		99,62	82,23	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	37.298.853.440	31.753.251.190	32.235.128.890	37.088.839.927	20.835.947.195		99,44	65,62	
Administrasi Tata Pemerintahan	26.055.527.790	8.777.249.590	1.164.479.190	25.928.671.786	8.445.444.565		99,51	96,22	
Penataan Administrasi Pemerintahan	24.904.085.000	7.763.900.850	361.899.000	24.876.668.500	7.518.100.905		99,89	96,83	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	786.160.690	696.056.740	522.002.190	763.166.082	631.881.130		97,08	90,78	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	365.282.100	317.292.000	280.578.000	288.837.204	295.462.530		79,07	93,12	

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Presentase Realisasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.700.397.650	22.289.729.700	29.912.459.700	10.622.028.201	11.705.601.080		99,27	52,52	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.094.717.275	21.924.112.300	29.128.248.500	10.047.646.901	11.363.201.620		99,53	51,83	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	385.984.175	220.243.200	610.714.600	354.847.100	210.783.210		91,93	95,70	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	219.696.200	145.374.200	173.496.600	219.534.200	131.616.200		99,93	90,54	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	542.928.000	686.271.900	1.158.190.000	538.139.940	684.901.600		99,12	99,80	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	221.576.160	332.468.300	563.434.400	220.490.800	332.348.100		99,51	99,96	
Fasilitasi Bantuan Hukum	266.726.840	278.798.000	447.355.000	266.546.840	278.791.100		99,93	100,00	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	54.625.000	75.005.600	147.400.600	51.102.300	73.767.400		93,55	98,35	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.610.274.328	1.758.561.106	2.306.861.700	1.582.447.520	1.633.901.255		98,27	92,91	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	365.154.000	362.563.500	464.969.500	354.412.100	316.068.355		97,06	87,18	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	34.682.000	73.898.000	73.734.500	34.558.200	73.640.242		99,64	99,65	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	103.191.600	165.836.200	199.258.200	93.413.700	137.424.715		90,52	82,87	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	98.860.400	68.820.600	68.820.600	98.584.500	66.990.420		99,72	97,34	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	80.566.000	44.225.900	56.472.200	80.366.500	28.502.178		99,75	64,45	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	47.854.000	9.782.800	66.684.000	47.489.200	9.510.800		99,24	97,22	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	530.720.784	619.200.800	1.226.946.060	520.158.500	612.218.700		98,01	98,87	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	37.628.200	40.773.300	73.706.250	37.075.500	40.746.200		98,53	99,93	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	402.868.000	459.599.500	1.006.014.310	400.043.000	455.028.500		99,30	99,01	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	90.224.584	118.828.000	147.225.500	83.040.000	116.444.000		92,04	97,99	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	597.290.074	667.083.406	502.864.740	590.831.950	601.076.789		98,92	90,11	

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Presentase Realisasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	193.957.000	265.273.300	145.393.000	192.428.100	211.633.800		99,21	79,78	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	269.066.074	224.179.106	273.412.740	264.825.100	214.092.401		98,42	95,50	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	134.267.000	177.631.000	84.059.000	133.578.750	175.350.588		99,49	98,72	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	117.109.470	109.713.400	112.081.400	117.044.970	104.537.411		99,94	95,28	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	22.728.000	43.953.300	34.289.300	22.728.000	43.118.061		100,00	98,10	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	31.737.000	-	-	31.672.500	-		99,80	0,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	62.644.470	65.760.100	77.792.100	62.644.470	61.419.350		100,00	93,40	
	68.320.397.234	64.457.792.849	62.155.203.894	67.066.968.352	52.266.126.150		98,17	81,09	

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
b. Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik.
c. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi
d. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
e. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.
f. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

2.4.2. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
c. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
e. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1. Permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan pengadaan barang/ jasa	Pejabat pengadaan di PBJ masih memfasilitasi OPD lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kewilayahan	Belum ada	Terbatasnya jumlah pelaku pengadaan terutama pejabat pengadaan barang/jasa	Ketersediaan SDM pada setiap OPD di Pemerintah Kota Bima yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa masih minim	Kurang optimalnya proses pemilihan pengadaan barang/jasa
Kewajiban Penyusunan Laporan Penyeleng garaan Pemerintah an Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggun gjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyeleng garaan Pemerintah an Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan	Laporan tersusun tepat waktu	a. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. PP Nomor 13/2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara an Pemerintahan Kepada Masyarakat	Kuantitas dan kualitas SDM	1. Komitmen dari perangkat daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan 2. Terbitnya peraturan/ pedoman baru terkait penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai dan memerlukan waktu yang agak lama
Hukum: a. Efektifitas dan jumlah produk hukum b. permasalahan hukum dan HAM c. Kualitas pendokument asian produk hukum d. Efektifitas pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah	a. Kurang efektif pelaksanaan dan jumlah produk hukum yang banyak dan tumpang tindih b. Masih adanya Permasalahan hukumd an HAM c. Kurangnya fasilitas pendokumentasian produk hukum daerah d. Pelaksanaan sosialisasi masih belum merata	a. UU No.11 tahun 2020 ttg Cipta Kerja b. UU No. 1 tahun 2022 ttg Hubungan Keuangan Antara Pempus dan Pemda. c. UU No. 12 tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan d. Permendagri No. 12 tahun 2014 e. UU Pemda No. 23 tahun 2014 f. UU No 16 Tahun 2011 g. Perpres No. 53 Tahun 2021 h. Permenkumham No. 22 Tahun 2021	a. Jumlah SDM b. Anggaran yang terbatas c. Kurangnya literatur	a. Adanya UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaanya, b. Adanya UU No. 1 tahun 2022, c. Adanya putusan MK tentang Judicial review UU Cipta Kerja, d. Pelaksanaan Persidangan yang lama, e. Dukungan OPD dalam HAM yang kurang serta Pandemi covid19 yang membuat pertemuan tatap muka dibatasi	a. Banyaknya peraturan perundang-undangan di pusat yang perlu ditindaklanjuti b. Dukungan anggaran yang masih terbatas c. Masih ada perkara yang belum selesai, d. Dinamisnya perubahan kebijakan pusat e. Perubahan instrumen dan tema penilaian kota peduli HAM setiap tahunnya f. Kurangnya SDM pada setiap kelompok substansi g. Terbatasnya peralatan pendokument asian produk hukum h. Terbatasnya ruangan untuk penokumentas ian produk hukum
Kelembagaan yang harus menyesuaikan dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi	Kelembagaan yang ada sudah sesuai dengan konsep penyederhanaan birokrasi saat ini.	a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021	Komitmen untuk pelaksanaan penyederhanaan birokrasi	Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyederhanaan birokrasi yang belum memadai	Belum tersedianya Aturan yang memadai dari Pusat terkait dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.
Perubahan mekanisme pelayanan publik.	a. Pelayanan publik sudah terintegrasi dalam sistem JSS b. Sistem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan sedang dalam proses penyesuaian karena adanya perubahan pelayanan dari manual ke digital	a. UU No 25 tahun 2009 b. UU No.11Tahun 2020 c. PP No. 96 Tahun 2012 d. PP No. 5 Tahun 2021 e. PP No. 6 Tahun 2021	Telah tersedia Peraturan Walikota yang mengatur tentang layanan publik di Pemerintah Kota Bima	a. Amanat dari Perpres No. 95 Tahun 2018 b. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas layanan	a. Perlunya penyesuaian regulasi yang mendukung pelayanan publik terintegrasi dalam sistem JSS. b. Perlunya penyesuaian Sistem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan yang mendukung perubahan pelayanan dari manual ke digital.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Kualitas layanan keprotokolan	Belum adanya standar baku terkait pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi.	a. Kurangnya jumlah personil dan adanya personil baru yang masih harus adaptasi dengan intensitas kerja yang tinggi. b. Intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan standar baku atau juknis turunan terkait pelayanan keprotokolan dan pimpinan	Belum adanya peraturan standar baku atau juknis turunan terkait pelayanan keprotokolan dan pimpinan menyebabkan pelayanan yang berbeda sesuai keinginan masing- masing pimpinan
Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik sub kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Sub Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	a. PPTK, PPKom dan petugas urusan kurang koordinasi dalam melakukan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporannya pada sub kegiatan b. PPTK masih kurang koordinasi dalam	Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
Penyusunan kebijakan, Tugas dan Fungsi	Tercapainya kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, Terlaksananya realisasi kegiatan pada anggaran setiap Triwulan, Kerjasama dan Koordinasi dengan Mitra OPD		Tusi lembaga	Mitra OPD yang terkait	Terkendala waktu dan berbenturan dengan ketugasan dari Mitra OPD lain sehingga ada ketidak tepatan dalam pelaksanaan target sasaran, baik dalam bidang anggaran target fisik maupun keuangan
Evaluasi Kerjasama Daerah	Belum dilaksanakan dengan optimum	Belum ada	Kurangnya jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah kerja sama yang harus dievaluasi	Perangkat Daerah pelaksana kerja sama daerah tidak memberikan Laporan pelaksanaan kerja sama daerah dengan tertib	Kurangnya jumlah SDM dan belum optimumnya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah
Pengelolaan barang persediaan	Laporan barang persediaan di tingkat setda sering tidak sinkron	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	SDM	Kurang koordinasi antara PengurusBarang dengan Bendahara	Masih sering terjadi ketidaksinkronan dalam penyusunan laporan barang persediaan di tingkat setda

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, Sekretariat Daerah Kota Bima dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Bima dapat dibagi menjadi empat isu utama, yaitu:

1. Isu terkait kesejahteraan rakyat:
   a. Pengembalian dana hibah oleh Mitra OPD diakhir tahun, dan adanya keterlambatan laporan pada OPD Pengampu Anggaran, sehingga mempengaruhi capaian keuangan yang tidak maksimal.
   b. Program pemberdayaan yang dilakukan OPD masih kurang tepat sasaran, banyak pelatihan yang dilakukan tanpa ada proses lebih lanjutnya saja, hanya menjadi pelatihan-pelatihan saja, tanpa ada pendampingan dan pelatihan lebih lanjut, Dan dari banyaknya pelatihan

diikuti oleh peserta yang sama, sehingga program yang diberikan menjadi kurang merata.

c. Realisasi fisik tercapai tetapi pada realisasi keuangan tidak mencapai target yang telah direncanakan. Sehingga berdampak pada capaian hasil akhir target yang telah ditentukan.

2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan :
   a. Belum adanya regulasi yang jelas terkait petunjuk teknis pengisian Indikator Kinerja Kunci sehingga penerjemahan masing-masing indicator masih bersifat multitafsir.
   b. Adanya perubahan regulasi mendadak tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah pusat menyebabkan penyusunan laporan menjadi terhambat.
   c. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundangan, Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM, Pendokumentasian Produk Hukum Daerah serta Penyebaran Informasi Peraturan Perundangan.
3. Isu terkait perekonomian dan pembangunan:
   a. Evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah belum optimal.
   b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
   c. Perencanaan target fisik masih belum ideal.
   d. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
   e. Rendahnya Kualitas BUMD
4. Isu terkait pelayanan publik :
   a. Perubahan sistem layanan publik dari manual ke digital dan terintegrasi.
   b. Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui:
      i. Penataan struktur organisasi yang lincah salah satunya penyederhanaan birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat sehingga perlu penyempurnaan dan evaluasi struktur organisasi yang sudah maupun yang belum mengalami penyederhanaan birokrasi;
      ii. Penataan manajemen organisasi melalui penerapan kebijakan penyusunan SOP sampai unit terendah minimal 5 SOP, penyusunan proses bisnis semua perangkat daerah sampai dengan level L2, perbaikan manajemen kinerja semua perangkat daerah melalui nilai SAKIP dengan predikat A, pelaksanaan reformasi birokrasi merata pada perangkat daerah/unit kerja dengan capaian nilai hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) diatas 70, peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang terstandar (SPP).

c. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
d. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan.
e. Pengelolaan barang persediaan yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan barang persediaan di tingkat setda

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam RPD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Bima. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Bima secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke -		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100	100	100
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	68,48	68,48	68,48
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	2,80	2,90	3,00
4.	Tertatanya Produk Hukum Daerah	4. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah	100	100	100
5.	Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pembangunan	5. Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100	100	100
		6. Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	28,44	29,30	30,18
6.	Meningkatkan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	7. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100	100	100
7.	Meningkatkan kualitas pelayanan admnistrasi dan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur	8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100	100	100
8.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	9. Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	80,00	82,00	84,00

Tabel 4.2. Formula Perhitungan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima

No	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang ditindak lanjutin}}{\text{Jumlah kebijakan perekonomian}} \times 100\%$	Hasil pendataan	Kabag. Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	Hasil Penilaian evaluasi akuntabilitas terhadap instansi Pemerintah Kota Bima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian	Kabag. Organisasi Setda Kota Bima
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	Hasil Penilaian dan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bima	Hasil Penilaian	Kabag. Pemerintahan Setda Kota Bima
4.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang sesuai mekanisme}}{\text{Jumlah produk hukum yang dibuat}} \times 100\%$	Hasil pendataan	Kabag. Hukum Setda Kota Bima
5.	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyampaikan laporan realisasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Hasil pendataan	Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kota Bima
6.	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja modal dan operasional}} \times 100\%$	Hasil pendataan	Kabag. PBJ Setda Kota Bima
7.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan}}{\text{Jumlah kebijakan yang ditindak lanjuti}} \times 100\%$	Hasil pendataan	Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bima
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik}}{\text{jumlah sarana dan prasarana}} \times 100\%$	Hasil pendataan	Kabag. Umum Setda Kota Bima
9.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	survei terhadap nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama umat beragama terhadap pengamalan ajaran agama	Hasil survey Indeks Kerukunan Umat Beragama	Kabag. Kesra Setda Kota Bima

Tabel 4.3. Casecading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
Meningkatknya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	2,98	3,13	3,28	Meningkatnya pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100%	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
															Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
															Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
															Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
															Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
															Pemantauan Kebijakan Sumber Daya alam	**Terselenggaranya Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
															Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
															Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
															Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60,14 %	62,55 %	65,05 %	Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Meningkatkan akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	28,44 %	29,30 %	30,18 %	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100%	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	100 %	100 %	100 %
															Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen
															Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen
															Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46 Orang	46 Orang	46 Orang
						Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Porsentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai aturan	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Indikator Kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100%	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
															Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan
											Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100%	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Terlaksanya Administrasi Pembangunan**	**Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	**1** Dokumen	**1** Dokumen	1 Dokumen
															Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan
															Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
					Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatknya Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	68,48	68,48	68,48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Indikator Kinerja layanan Penunjang Perangkat Daearah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100%	**Penataan Organisasi**	**Terlaksananya Penataan Organisasi**	**Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
															Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
															Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
															Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
					Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	2,80	2,90	3,00	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terlaksanya Admnistrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen
															Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
															Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
					Tertatanya Produk Hukum Daerah	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690 Dokumen	690 Dokumen	690 Dokumen
															Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus
															Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85 Dokumen	85 Dokumen	90 Dokumen

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
					Meningkatkan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Indikator Kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	10%	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900 Laporan	900 Laporan	900 Laporan
															Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
															Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumeatasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
					meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Indikator Kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100%	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	120 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan
															Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
															Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
															Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai**	**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	100 %	**100 %**
															Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket, 57 Jenis	1 Paket, 57 Jenis	1 Paket, 57 Jenis
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket, 24 Jenis	1 Paket, 24 Jenis	1 Paket, 24 Jenis
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	Dokumen

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
															Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan
															Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	58 Unit	58 Unit	58 Unit
															Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	30 unit	30 unit
															Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	30 unit	30 unit

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
															Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya layanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai**	**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
															Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
															Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya kebutuhan pemenfaatan barang milik daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	24 Unit
															Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
															Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	211 Unit	211 Unit
															Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya melihara an/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit
															Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit
															Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan
															Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tecsedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
															Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	10 Orang	10 Orang
															Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan
															Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga KepalaDaerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
															Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
															Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket

Sasaran Kota	IKU Kota	Target Kinerja			Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target OPD			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		
		2024	2025	2026				2024	2025	2026								2024	2025	2026
Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Indeks rasa aman	88,48 %	88,92 %	88,37 %	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	80%	82%	84%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
															Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen
															Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
															Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bima secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Meningkatkan Kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	1. Melaksanakan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
			Meningkatkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perekonomian	1. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perekonomian
			Meningkatkan BUMD dan BLUD berkinerja baik	1. elaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1. Review capaian pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi dan pengkajian kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 2. Membangun kapasitas daerah (sistem, kelembagaan, individu) bagi percepatan implementasi reformasi birokrasi 3. Melaksanakan dan mengembangkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, pengawasan, pelaporan, penataan kelembagaan dan pengembangan profeisonalisme ASN
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	1. Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2. Melaksanakan Penataan Administrasi Pemerintahan
			Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Wilayah	1. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4.	Tertatanya Produk Hukum Daerah	4. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	1. Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM 3. Melaksanakan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
5.	Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pembangunan	5. Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan Ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	1. Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 2. Melaksanakan Fasilitasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan
		6. Meningkatnya akuntabilitas Layanan	Meningkatkan Pemenuhan standar ketepatan	1. Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	waktu dan tingkat layanan pengadaan barang/jasa	jasa 2. Melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 3. Melaksanakan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Meningkatkan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	7. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	Meningkatkan Kualitas Layanan Keprotokolan	1. Melaksanakan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan
7.	meningkatkan kualitas pelayanan admnistrasi dan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur	8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Peningkatan standar pelayanan publik yang cepat, mudah dan ramah	1. Memperkuat tatanan kelembagaan dan sistem penyediaan pelayanan publik terstandar dan tersertifikasi 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta profesionalime dan kompetensi aparatur penyedia layanan publik
8.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	9. Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Pembinaan Lembaga-lembaga keagamaan, lembaga adat serta lembaga sosial kemasyarakatan	1. Meningkatkan kualitas SDM Lembaga Agama dan Masyarakat melalui pembinaan kompetensi penyuluh agama/petugas keagamaan 2. Penguatan lembaga-lembaga keagamaan dengan pemberian bantuan hibah 3. Pelaksanaan MTQ/STQ 4. Pelaksanaan Tahsin dan Khatam Al-Qur'an untuk anak usia sekolah
			Peningkatan pelestarian, pengembangan dan pengelolaan budaya lokal	1. Mengefektifkan Peran Lembaga-Lembaga dan Sanggar Seni Budaya 2. Pelaksanaan Pagelaran seni budaya 3. Penguatan Lembaga/Komunitas Budaya Lokal

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupum program, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kota Bima yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Dalam rangka mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kota Bima dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi.

Adapun untuk uraian yang lebih detil mengenai Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan pada Sekretariat Daerah tahun 2024-2026 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Bima

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Keg. (Output)	Data Capaian pada Thn. Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
Sekreatriat Daerah		100	Porsen	100 Porsen	62.158.311.654	100 Porsen	62.161.419.570	100 Porsen	62.164.527.641	100 Porsen	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100	Porsen	100 Porsen	27.614.593.965	100 Porsen	27.615.974.694	100 Porsen	27.617.355.493	100 Porsen	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	100	Porsen	100 Porsen	12.504.625	100 Porsen	12.505.250	100 Porsen	12.505.876	100 Porsen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1 Dokumen	1.648.082	1 Dokumen	1.648.165	1 Dokumen	1.648.247	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1 Dokumen	2.714.136	1 Dokumen	2.714.271	1 Dokumen	2.714.407	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1 Dokumen	2.714.136	1 Dokumen	2.714.271	1 Dokumen	2.714.407	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1 Dokumen	2.714.136	1 Dokumen	2.714.271	1 Dokumen	2.714.407	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1 Dokumen	2.714.136	1 Dokumen	2.714.271	1 Dokumen	2.714.407	1 Dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	Porsen	100 Porsen	13.878.799.008	100 Porsen	13.879.492.948	100 Porsen	13.880.186.923	100 Porsen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/bulan	120 Orang/bulan	13.241.874.664	120 Orang/bulan	13.242.536.757	120 Orang/bulan	13.243.198.884	120 Orang/bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Dokumen	3 Dokumen	632.291.115	3 Dokumen	632.322.728	3 Dokumen	632.354.344	3 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1 Laporan	1.843.092	1 Laporan	1.843.184	1 Laporan	1.843.276	1 Laporan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18	Laporan	18 Laporan	2.790.140	18 Laporan	2.790.279	18 Laporan	2.790.419	18 Laporan	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Keg. (Output)	Data Capaian pada Thn. Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)
SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6**	**Porsen**	**6 Porsen**	**13.234.862**	**6 Porsen**	**13.235.523**	**6 Porsen**	**13.236.185**	**6 Porsen**	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	6 Dokumen	13.234.862	6 Dokumen	**13.235.523**	6 Dokumen	**13.236.185**	6 Dokumen	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Porsen**	**100 Porsen**	**1.657.007.382**	**100 Porsen**	**1.657.090.233**	**100 Porsen**	**1.657.173.087**	**100 Porsen**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	63.892.294	1 Paket	**63.895.489**	1 Paket	**63.898.684**	1 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	94.716.711	1 Paket	**94.721.446**	1 Paket	**94.726.183**	1 Paket	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	59.056.853	1 Paket	**59.059.806**	1 Paket	**59.062.759**	1 Paket	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12 Laporan	1.136.497.872	12 Laporan	**1.136.554.697**	12 Laporan	**1.136.611.525**	12 Laporan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**54**	**Laporan**	**54 Laporan**	**302.843.652**	**54 Laporan**	**302.858.795**	**54 Laporan**	**302.873.938**	**54 Laporan**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32	Unit	32 Unit	1.004.590.227	32 Unit	**1.004.640.457**	32 Unit	**1.004.690.689**	32 Unit	
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	2 Unit	705.765.287	2 Unit	**705.800.575**	2 Unit	**705.835.865**	2 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**30**	**unit**	**30 unit**	**298.824.941**	**30 unit**	**298.839.882**	**30 unit**	**298.854.824**	**30 unit**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Porsen	100 Porsen	3.293.274.135	100 Porsen	**3.293.438.799**	100 Porsen	**3.293.603.471**	100 Porsen	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	4 Laporan	290.441.521	4 Laporan	**290.456.043**	4 Laporan	**290.470.566**	4 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12 Laporan	1.355.523.573	12 Laporan	**1.355.591.349**	12 Laporan	**1.355.659.129**	12 Laporan	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Keg. (Output)	Data Capaian pada Thn. Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12**	**Laporan**	**12 Laporan**	**1.647.309.041**	**12 Laporan**	**1.647.391.407**	**12 Laporan**	**1.647.473.776**	**12 Laporan**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100	Porsen	100 Porsen	1.667.913.392	100 Porsen	**1.667.996.787**	100 Porsen	**1.668.080.187**	100 Porsen	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	24 Unit	450.652.532	24 Unit	**450.675.064**	24 Unit	**450.697.598**	24 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	28 Unit	653.502.674	28 Unit	**653.535.349**	28 Unit	**653.568.025**	28 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211	Unit	211 Unit	201.220.061	211 Unit	**201.230.122**	211 Unit	**201.240.183**	211 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	10 Unit	339.516.975	10 Unit	**339.533.951**	10 Unit	**339.550.928**	10 Unit	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi**	**3**	**Unit**	**3 Unit**	**23.021.151**	**3 Unit**	**23.022.302**	**3 Unit**	23.023.453	**3 Unit**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Porsen	100 Porsen	1.222.960.730	100 Porsen	**1.223.021.878**	100 Porsen	**1.223.083.029**	100 Porsen	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	521.425.655	2 Orang/Bulan	**521.451.726**	2 Orang/Bulan	**521.477.799**	2 Orang/Bulan	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	121.506.075	1 Paket	**121.512.150**	1 Paket	**121.518.226**	1 Paket	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	Orang	10 Orang	180.009.000	10 Orang	**180.018.000**	10 Orang	**180.027.001**	10 Orang	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**2**	**Orang/Bulan**	**2 Orang/Bulan**	400.020.000	**2 Orang/Bulan**	400.040.001	**2 Orang/Bulan**	400.060.003	**2 Orang/Bulan**	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Keg. (Output)	Data Capaian pada Thn. Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah	100	Porsen	100 Porsen	1.785.004.146	100 Porsen	**1.785.093.396**	100 Porsen	**1.785.182.651**	100 Porsen	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	1.029.659.480	1 Paket	**1.029.710.963**	1 Paket	**1.029.762.449**	1 Paket	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	592.833.640	1 Paket	**592.863.282**	1 Paket	**592.892.925**	1 Paket	
Penataan Organisasi	**Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan**	**1**	**Paket**	**1 Paket**	**162.511.025**	**1 Paket**	**162.519.151**	**1 Paket**	**162.527.277**	**1 Paket**	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100	Porsen	100 Porsen	510.404.019	100 Porsen	**510.429.539**	100 Porsen	**510.455.061**	100 Porsen	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10	Dokumen	10 Dokumen	258.539.426	10 Dokumen	**258.552.353**	10 Dokumen	**258.565.281**	10 Dokumen	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	1 Laporan	54.708.735	1 Laporan	**54.711.471**	1 Laporan	**54.714.206**	1 Laporan	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	2 Dokumen	40.033.002	2 Dokumen	**40.035.003**	2 Dokumen	**40.037.005**	2 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	Dokumen	4 Dokumen	39.028.451	4 Dokumen	**39.030.403**	4 Dokumen	**39.032.354**	4 Dokumen	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**	**2**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**118.094.404**	**2 Dokumen**	**118.100.309**	**2 Dokumen**	**118.106.214**	**2 Dokumen**	
Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	Porsen	100 Porsen	2.568.901.439	100 Porsen	**2.569.029.884**	100 Porsen	**2.569.158.335**	100 Porsen	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900	Laporan	900 Laporan	1.686.144.308	900 Laporan	**1.686.228.610**	900 Laporan	**1.686.312.922**	900 Laporan	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10	Laporan	10 Laporan	541.609.579	10 Laporan	**541.636.660**	10 Laporan	**541.663.741**	10 Laporan	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan**	**12**	**Laporan**	**12 Laporan**	**341.147.557**	**12 Laporan**	**341.164.614**	**12 Laporan**	**341.181.672**	**12 Laporan**	
Administrasi Tata Pemerintahan					**32.236.740.646**		**32.238.352.483**		**32.239.964.401**		
Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100	Porsen	100 Porsen	1.164.537.414	100 Porsen	**1.164.595.641**	100 Porsen	**1.164.653.871**	100 Porsen	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7	Dokumen	7 Dokumen	361.917.095	7 Dokumen	**361.935.191**	7 Dokumen	**361.953.288**	7 Dokumen	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Keg. (Output)	Data Capaian pada Thn. Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	Dokumen	3 Dokumen	522.028.290	3 Dokumen	522.054.392	3 Dokumen	522.080.494	3 Dokumen	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**4**	**Dokumen**	**4 Dokumen**	280.592.029	**4 Dokumen**	280.606.059	**4 Dokumen**	**280.620.089**	**4 Dokumen**	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	Porsen	100 Porsen	29.913.955.323	100 Porsen	**29.915.451.021**	100 Porsen	**29.916.946.793**	100 Porsen	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13	Dokumen	13 Dokumen	29.129.704.912	13 Dokumen	**29.131.161.398**	13 Dokumen	**29.132.617.956**	13 Dokumen	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan	3	Dokumen	3 Dokumen	610.745.136	3 Dokumen	**610.775.673**	3 Dokumen	**610.806.212**	3 Dokumen	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas**	**2**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**173.505.275**	**2 Dokumen**	**173.513.950**	**2 Dokumen**	**173.522.626**	**2 Dokumen**	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100	Porsen	100 Porsen	1.158.247.910	100 Porsen	**1.158.305.822**	100 Porsen	**1.158.363.737**	100 Porsen	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	655	Dokumen	655 Dokumen	563.462.572	655 Dokumen	**563.490.745**	655 Dokumen	**563.518.919**	655 Dokumen	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	Kasus	2 Kasus	447.377.368	2 Kasus	**447.399.737**	2 Kasus	**447.422.107**	2 Kasus	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	**Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi**	90	**Dokumen**	**90 Dokumen**	147.407.970	**90 Dokumen**	147.415.340	**90 Dokumen**	147.422.711	**90 Dokumen**	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	100	**Porsen**	**100 Porsen**	2.306.977.043	**100 Porsen**	2.307.092.392	**100 Porsen**	2.307.207.747	**100 Porsen**	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100	Porsen	100 Porsen	464.992.748	100 Porsen	**465.015.998**	100 Porsen	**465.039.249**	100 Porsen	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	Dokumen	5 Dokumen	73.738.187	5 Dokumen	**73.741.874**	5 Dokumen	**73.745.561**	5 Dokumen	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	4 Laporan	199.268.163	4 Laporan	**199.278.126**	4 Laporan	**199.288.090**	4 Laporan	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	8	Dokumen	8 Dokumen	58.824.041	8 Dokumen	**68.827.482**	8 Dokumen	**68.830.924**	8 Dokumen	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Keg. (Output)	Data Capaian pada Thn. Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)
	Kecil										
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Dokumen	1 Dokumen	56.475.024	1 Dokumen	56.477.847	1 Dokumen	56.480.671	1 Dokumen	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD**	1	**Dokumen**	**1 Dokumen**	**66.687.334**	**1 Dokumen**	**66.690.669**	**1 Dokumen**	66.694.003	**1 Dokumen**	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	100	Porsen	100 Porsen	1.227.007.407	100 Porsen	**1.227.068.758**	100 Porsen	**1.227.130.111**	100 Porsen	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dokumen	1 Dokumen	73.709.985	1 Dokumen	**73.713.621**	1 Dokumen	**73.717.306**	1 Dokumen	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6	Laporan	6 Laporan	1.006.064.611	6 Laporan	**1.006.114.914**	6 Laporan	**1.006.165.220**	6 Laporan	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**16**	**Laporan**	**16 Laporan**	**147.232.861**	**16 Laporan**	**147.240.223**	**16 Laporan**	**147.247.585**	**16 Laporan**	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	Porsen	100 Porsen	502.889.883	100 Porsen	**502.915.028**	100 Porsen	**502.940.173**	100 Porsen	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72	Dokumen	72 Dokumen	145.400.270	72 Dokumen	**145.407.540**	72 Dokumen	**145.414.810**	72 Dokumen	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36	Dokumen	36 Dokumen	273.426.411	36 Dokumen	**273.440.082**	36 Dokumen	**273.453.754**	36 Dokumen	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**46**	**Orang**	**46 Orang**	**84.063.203**	**46 Orang**	**84.067.406**	**46 Orang**	**84.071.609**	**46 Orang**	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	Porsen	100 Porsen	112.087.004	100 Porsen	**112.092.608**	100 Porsen	**112.098.213**	100 Porsen	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dokumen	4 Dokumen	34.291.014	4 Dokumen	**34.292.729**	4 Dokumen	**34.294.444**	4 Dokumen	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Keg. (Output)	Data Capaian pada Thn. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
			Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)	Target	RP (000)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	77.795.990	4 Dokumen	77.799.879	4 Dokumen	77.803.769	4 Dokumen	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretraiat Daerah Kota Bima, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi administrasi pembangunan.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima tahun 2024 - 2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saatmenyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja periode sebelumnya serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima yang termuat dalam RPD maka secara rinci indikator kinerja untuk tiga tahun kedepan 2024-2026 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bima Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
2	Nilai Sakip	68,48	68,48	68,48	68,48	68,48
3	Nilai LPPD	Sedang (2,80)	Sedang (2,80)	Sedang (2,90)	Sedang (3,00)	Sedang (3,00)
4	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah	100	100	100	100	100
5	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100	100	100	100	100
6	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	28,44	28,44	29,30	30,18	30,18
7	Porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
8	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100	100	100	100	100
9	Indeks kerukunan umat beragama	80	80	82	84	84

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

IKK Kota Bima yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah yang Tahun 2024-2026

No	Indikator	Capaian 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	14,73%	16,10%	16,58%	17,08%	17,08%
2.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	26,03%	28,44%	29,30%	30,18%	30,18%

1. IKK Outcome : Porsentase Jumlah Penggandaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif

Penjelasan IKK outcome

Konsep/Definisi	Mengukur Tingkat Pelaksanaan Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penggandaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengandaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\ \%$

2. IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Penjelasan IKK outcome

Konsep/Definisi	Mengukur Rasio Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan
Rumus	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja modal dan operasional}} \times 100\ \%$

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kota Bima Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026. Dalam Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata - mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Drs. MUKHTAR, M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690531 199003 1 004